

mengenai harga dari barang yang digadaikan dan syarat-syarat lainnya, termasuk di dalamnya mengenai pemberian uang yang akan diberikan kepada penggadai (*rahin*) dan pengembalian uang dari penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*).

Adapun tata cara menggadaikan sepeda motor di desa pekiringan yaitu bapak Imron (*murtahin*) menerima barang yang akan di gadaikan oleh penggadai (*rahin*) dengan mentaksir harga untuk barang gadai yang setara dengan uang yang akan dipinjamkan, setelah terjadi kesepakatan antara bapak Imron (*murtahin*) dan penggadai (*rahin*) selanjutnya uang diberikan ke penggadai (*rahin*) dan barang diberikan kepada bapak Imron (*murtahin*) sebagai barang jaminan yang kemudian barang jaminan tersebut disimpan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh bapak Imron (*murtahin*).

Dalam syarat utang ada penambahan uang dengan cara pengurangan uang 10% dari kesepakatan dan pembayaran penuh saat pelunasan sehingga adanya penambahan uang 10% bagi penggadai (*rahin*). Apabila penggadai tersebut tidak bisa membayar bapak Imron memberikan toleransi penambahan jangka waktu kepada penggadai (*rahin*) namun jika tetap tidak bisa membayar maka barang tersebut akan dijual kemudian sisa uang penjualan akan di berikan kepada penggadai (*rahin*).

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

1. Analisis Dari Segi *Rahn*

Sah tidaknya sangat berkaitan dengan rukun dan syarat. Ditinjau dari rukun dan syaratnya, gadai yang dilakukan di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol.

Syarat yang pertama, *shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*) adalah *shigat aqdi*. *shigat aqdi* memerlukan tiga syarat:

- a. Harus terang pengertiannya
- b. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*
- c. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal ini lafal *ijab* dan *qabul* yang dilakukan pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) dalam praktik gadai di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga telah memenuhi syarat tersebut karena kedua belah pihak melafalkannya dengan jelas dan adanya kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Syarat yang kedua, Syarat orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*). Dalam akad gadai orang yang berakad adalah unsur yang paling penting karena sangat mempengaruhi terhadap sah atau tidaknya gadai tersebut dilakukan. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan dalam bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang telah *baligh* dan berakal. Sedangkan, menurut ulama Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti *ahliyah* dalam jual beli dan derma (pemberian). *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum *baligh*. Begitu pula seseorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan darurat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

Berdasarkan hal ini, maka orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak boleh mengadakan akad gadai atau dengan kata lain tidak boleh menggadaikan dan menerima gadai. Dalam hal ini pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) dalam praktik gadai di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga telah memenuhi syarat tersebut karena kedua belah pihak cakap dalam bertindak hukum dan bukan orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum *baligh*.

Syarat yang ketiga, Syarat barang gadai (*marhun*). *Marhun* adalah barang yang ditahan oleh penerima gadai (*murtahin*) sebagai jaminan atas utang yang ia berikan. Barang yang dijadikan jaminan harus dalam keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Syarat barang gadai (*marhun*) adalah:

- 1) Barang gadai (*marhun*) itu barang yang bisa diperjualbelikan dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
- 2) Barang gadai (*marhun*) harta yang bisa dimanfaatkan secara syariah (halal),
- 3) milik sah pemberi gadai (*rahin*),
- 4) harus jelas keberadaannya.
- 5) Barang gadai (*marhun bih*) tidak terikat dengan hak orang lain.

Dalam hal ini barang yang digadaikan (*marhun*) yang dilakukan pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) dalam praktik gadai di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga telah memenuhi syarat tersebut karena barang gadai (*marhun*) berupa Sepeda

motor. Sepeda motor adalah barang yang bisa diperjualbelikan, dapat dimanfaatkan secara syariah, milik sah penggadai, dan jelas keberadaannya.

Syarat yang keempat, syarat utang (*marhun bih*). Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba.

Dalam akad gadai dalam penerimaan uang utang, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabillah menetapkan tiga syarat utama, yakni :

- 1) Harus berupa utang yang tetap dan wajib ditunaikan.
- 2) Utang itu harus bersifat mengikat, seperti harga atas barang yang dibeli dalam transaksi jual beli.
- 3) Nominal utang harus diketahui secara jelas dan pasti.

Sementara Gadai yang diberlakukan di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga mengenai pencairan uang sudah memenuhi syarat akan tetapi menurut beberapa narasumber bahwa uang yang diberikan oleh penerima gadai (*murtahin*) dipotong sebesar 10% dari harga yang telah disepakati. Sehingga membuat adanya tambahan uang pada saat pelunasan. Kejadian tersebut membuat akad gadai itu menjadi fasid. Karena adanya penambahan pembayaran uang yang sudah disepakati. Memang dalam paraktiknya utang sudah terpenuhi sebagaimana syarat gadai akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat utang karena ada penambahan uang dengan cara pemotongan 10%.

